"Kartini Centang Biru"

Oleh: Michelle Angelina T.M

Raden Ajeng Kartini Djojo Adhiningrat atau R. A Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879. R. A Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Itulah sebabnya gelar Raden Adjeng alias R.A disematkan padanya. Kartini adalah anak perempuan tertua dari semua saudara sekandungnya. Kartini berkesempatan untuk mengenyam pendidikan di ELS (*Europese Lagere School*) saat usianya 12 tahun.



Source: https://alchetron.com/Kartini

Kartini menjadi pahlawan nasional yang menggerakkan kebebasan perbudakan untuk kaum perempuan di tanah air. Salah satu cara Kartini untuk mengangkat derajat perempuan dengan mendirikan sekolah untuk para perempuan dengan kelas ekonomi dan status sosial bawah. Pemikiran emansipasi perempuan oleh Kartini terpicu dari buku-buku yang ia baca, diantaranya Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta karya Multatuli, *De Stille Kracht* karya Louis Couperus, Buku-buku karangan Van Eeden, Augusta de Witt, dan Goekoop de-Jong Van Beek, Roman anti-perang *Die Waffen Nieder* karya Bertha Von Suttner. Kartini berharap para perempuan memiliki hak kehidupan yang sama dengan kaum laki-laki di masa itu.

Hasil pemikiran Kartini memicu sekaligus menggerakan generasi selanjutnya untuk tetap menjaga hak-hak perempuan. Pada era digital saat ini terbentuk 2 kata "sororitas" dan "solidaritas" dari pemikiran Kartini. Sororitas merupakan persaudaraan atau ikatan emosional dan dukungan antara perempuan. Solidaritas merupakan pendorong utama dalam pencapaian hak-hak perempuan. Contoh hak perempuan diantaranya, hak pendidikan, hak perlindungan, hak memilih, hak hidup nyaman dan lain sebagainya. Berikut beberapa kelompok yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia di antaranya: Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan), LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), Yayasan Pulih (Pusat Krisis Perempuan), Perempuan

Mahardhika, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI), Perempuan Bangkit, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan Perempuan (PKP2A).

Mengapa hak perempuan perlu diperjuangkan di era digital?

Indonesia merupakan negara hukum dimana HAM harus diperjuangkan oleh pemerintah. Meskipun perempuan di era digital memiliki hak atas hidupnya namun masih banyak juga oknum-oknum yang melarang dan membatasi hak mereka. Pada 20 Juni 2023 dilansir dari detikNews tentang "Catatan 21 Tahun Komnas Perempuan" ditemukan fakta bahwa kekerasan berbasis gender naik setiap tahunnya. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani menjelaskan bahwa jumlah pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan berbasis gender itu terus bertambah setiap tahunnya. Kekerasan yang dilakukan oleh oknum diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa hak-hak perempuan di era digital masih penting diperjuangkan karena dapat membatasi oknum yang melakukan kekerasan berbasis gender yang semakin masif karena pengaruh teknologi.

Era digital dapat menimbulkan kekerasan-kekerasan baru diantaranya pelecehan seksual online, penyebaran konten pornografi yang tidak diinginkan (*Non-Consensual Intimate Image*) dan penyalahgunaan data pribadi. Era yang serba digital mampu memberi dampak dari kesehatan mental dimana paparan media sosial terhadap informasi yang tidak selalu positif. Pada akhirnya memberikan dampak negatif pada kesehatan mental perempuan, seperti meningkatnya tingkat stress, kecemasan yang berlebihan serta depresi.

Cara yang mudah untuk mendukung hak perempuan dalam era digital, diantanya: 1) memperkuat kesadaran akan kekerasan berbasis teknologi, mendukung kampanye kesadaran dan pendidikan yang bertujuan untuk mengenali dan melawan kekerasan berbasis teknologi, termasuk pelecehan online, penyebaran konten yang merendahkan, dan penyalahgunaan data pribadi. 2) berpartisipasi dalam gerakan media sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan meningkatkan kesadaran akan isu-isu yang mempengaruhi perempuan, seperti kesenjangan upah gender, kekerasan berbasis gender, atau hak reproduksi. Menggunakan tagar (#) dan berbagi konten yang relevan dapat membantu memperluas jangkauan pesan dan memobilisasi dukungan untuk perubahan positif.

Era digital mampu menimbulkan kekerasan baru terhadap perempuan baik dalam penggunaan media sosial atau penggunaan teknologi komunikasi yang lain. Cara yang mudah untuk dilakukan untuk tetap mendukung gerakan anti kekerasan perempuan dengan menyuarakan kesadaran akan kekerasan perempuan. Prodi Studi Humanitas UKDW, tahun ini mengikuti lomba video *Women Support Women* dalam rangka "International Women's Day". Lomba ini diselenggarakan oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dan tim mahasiswa PSH mendapatkan juara 2. Kami menyadari bahwa dengan mengikuti acara lomba tersebut bukan sekedar mencari poin keaktifan atau pengakuan melainkan sebagai langkah untuk

meneruskan semangat Kartini di era digital yang mengadvokasi untuk anti-kekerasan seksual terhadap perempuan di lingkungan kampus. Kalau Kartini lahir di era sekarang ini maka pasti akun media sosialnya sudah dapat "centang biru" atau *verified* karena banyak sekali pengikut Kartini, termasuk dampak dari pemikiran Kartini masih kita rasakan sampai detik ini. Semoga kita dapat menjadi Kartini kekinian di era digital. Selamat Hari Kartini 2024!



Source: Dokumentasi Panitia Lomba "Women Support Women" UAJY dan UKDW